PENERAPAN STRATEGI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN

Membangun Masa Depan Bangsa Lebih Humanis

YOGYA (KR) - Penerapan strategi budaya dalam kehidupan sehari-hari maupun pemerintahan bukan hal yang perlu dikhawatirkan. Untuk itu, anggapan mengenai strategi budaya yang akan membuat masyarakat menjadi miskin, tidak sejahtera dan terbelakang adalah salah.

"Berdasarkan pengalaman DIY, pendekatan budaya bukan sama sekali merupakan sesuatu yang kuno. Melalui pendekatan budaya, masa depan bangsa bisa dibangun dengan lebih humanis. Bahkan strategi budaya ini telah terserap dengan baik di DIY melalui reformasi birokrasi. Budaya itu bukan dicermati sekadar orang-orang joget, berkesenian dan tradisi saja. Tapi budaya itu sama dengan peradaban. Berarti apa, karya manusia didasari karena cipta, rasa, karsa itu akan menjadi karya," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 Angkatan LIII 2022 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Selasa (24/5).

Pelatihan yang diwadahi LAN RI ini diikuti oleh ASN, polisi, BUMN, serta provinsi-provinsi yang sedang melakukan pelatihan untuk menjadi eselon 1 yaitu jabatan setingkat Dirjen dan Sekjen. Sultan menyoroti banyak pihak yang takut menerapkan strategi budaya karena menurut mereka hal itu identik dengan kemiskinan. Padahal hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali.

"Sejahtera ataupun tidak sejahtera kan tidak ada hubungannya dengan penerapan strategi budaya. Pekerja kesenian sebagai representasi budaya juga akan tetap hidup jika penghasilannya tinggi, buruh pabrik, tidak sejahtera apabila dibayar rendah. Sejahtera Itu tergantung upah yang diberikan bukan pada aspek pekerjaannya apa. Tidak ada relevansinya kaya miskin tergantung penghasilannya," tegas Sultan.

Sultan mengatakan, agar jangan takut menggunakan pendekatan budaya, karena lebih humanis dan lebih guyub. Tidak bisa dikatakan bahwa budaya identik dengan sesuatu yang berbau tradisional. Hal ini karena budaya berubah sesuai zamannya, akan terus bergerak mengembangkan diri.

Sementara itu Kepala LAN RI Adi Suryanto menyatakan, dirinya datang bersama para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 1 yang sedang mengambil kelas strategi budaya. Penting untuk para peserta pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan dan dasar mengenai bagaimana membangun integrasi bangsa. "Saya kira sangat cocok kita ke sini karena Yogyakarta sebagai daerah istimewa yang memiliki keistimewaan di bidang kebudayaan, di mana pembangunannya juga sangat ramah dengan kebudayaan. Strategi kebudayaan yang diterapkan saya harap bisa menginspirasi kawan-kawan," ungkap Adi.

Menurut Adi, DIY telah menerapkan strategi kebudayaan hampir di dalam setiap kegiatan pemerintahan termasuk dalam pelayanan publik dan pelayanan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan dirinya dan rombongan merasa DIY adalah tempat paling tepat untuk belajar. **(Ria)-f**

KR-Riyana Ekawati

Sri Sultan HB X berbincang bersama peserta pelatihan kepemimpinan Nasional Tingkat 1 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Kejati DIY Luncurkan 'Datun Suluh Praja'

YOGYA (KR) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY telah meluncurkan program 'Datun Suluh Praja'. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan bagi para pamong dengan harapan dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik khususnya peningkatan kemampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran desa agar tepat sasaran.

Kajati DIY Katarina Endang S SH MH mengatakan, pembangunan sekarang ini banyak di pusatkan di kalurahan. Sehingga saat ini kalurahan mengelola dana dari pemerintah yang cukup besar.

"Banyak anggaran pemerintah yang digelontorkan ke kalurahan. Karena banyak program pemerintah yang dimulai dari bawah atau kelurahan," kata Katarina, Selasa (24/5).

KR-Saifullah Nur Ichwan

Katarina Endang S SH MH

Untuk meningkatkan pengetahuan para pamong, jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara (datun) melakukan sosialisasi di kalurahan-kalurahan se-DIY. Sejak dicanangkannya Program Datun Suluh Praja, tim datun telah melaksanakan penyuluhan di ratusan kalurahan. "Sudah ada 367 kalurahan atau sekitar 93,6% dari total 392 kalurahan yang ada di DIY," terangnya.

Di samping meningkatkan pengetahuan pamong, program tersebut bertujuan meningkatkan kinerja yang lebih baik khususnya peningkatan kemampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran kalurahan. Harapannya pembangunan tepat sasaran dan peningkatan pendapat asli kalurahan.

"Kalau itu bisa tercapai, pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian rakyat sehingga angka kemiskinan dapat ditekan," pungkasnya. **(Sni)-f**

BERKAITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Nama Kurang dari Dua Kata Tak Diterima

YOGYA (KR) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogya sudah tidak akan menerima pengajuan nama yang kurang dari dua kata. Terutama untuk mengakses berbagai dokumen kependudukan.

Penolakan nama yang kurang dari dua kata tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Di dalamnya dijelaskan jika pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus mudah dibaca, tidak bermakna negatif, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi serta jumlah kata paling sedikit dua kata.

Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dindukcapil Kota Yogya Bram Prasetyo, menjelaskan aturan tersebut sudah berlaku tahun ini dan diterapkan di seluruh Indonesia. "Kalau kita kan mengikuti ketentuan di atasnya. Ketika sudah ada Permendagri yang mengatur perihal ketentuan nama, maka kita ikuti itu," jelasnya, Selasa (24/5).

Sebelumnya memang tidak ada ketentuan teknis perihal pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan yang dimaksud ialah kartu keluarga, kartu identitas anak, kartu tanda penduduk elektronik serta akta pencatatan sipil. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan tersebut dilakukan oleh Dindukcapil di daerah.

Menurut Bram, sejak Permendagri 73/2022 diterapkan maka sistem dalam administrasi kependudukan pun turut disesuaikan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar masyarakat terutama orangtua yang hendak memberikan nama anaknya agar mengikuti ketentuan. "Supaya nanti memudahkan dalam sistem, karena dalam sistem sudah disesuaikan begitu," imbuhnya.

Sejauh ini ketika aturan baru tersebut diterapkan, imbuh Bram, pihaknya belum menerima pengajuan nama yang hanya satu kata untuk pengurusan administrasi kependudukan. **(Dhi)-f**

Pita 700 MHz untuk Transformasi Digital

YOGYA (KR) - Pita frekuensi 700 MHz merupakan pita frekuensi 'emas' untuk peningkatan layanan internet. Namun di Indonesia penggunaannya masih hanya untuk siaran televisi analog. Dengan digitalisasi sistem penyiaran televisi, maka penggunaan frekuensi akan lebih optimal dan hasil efisiensinya (disebut Digital Dividend) dapat digunakan untuk pemerataan infrastruktur dan peningkatan layanan internet.

Demikian disampaikan Staff Khusus Kemenkominfo RI, Dr Rosarita Niken Widiastuti MSi dalam Forum Diskusi Publik bertema 'Partisipasi Masyarakat Menyongsong TV Digital' di Gedung Auditorium Prof Amin Abdullah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (23/5) dan disiarkan secara daring. Diskusi menghadirkan narasumber lain, Komisioner KPI Pusat Hardly Stefano dan Kepala Dinas Kominfo DIY Drs Tri Saktiana MSi dipandu moderator Okfied Sosendar. Sebagai pembicara kunci Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof Al Makin.

Menurut Rosarita, Boston Consulting Group memperkirakan manfaat dari Digital Dividend dengan peningkatan internet di Indonesia, maka dalam lima tahun akan menghasilkan multiplier effect. Antara lain 232 ribu penambahan lapangan kerja baru dan 118 ribu penambahan peluang usaha baru.

Rosarita juga menjelaskan 5 urgensi digitalisasi penyiaran. Yakni, kepentingan publik untuk memperoleh penyiaran yang berkualitas, efisiensi penggunaan frekuensi guna mendorong ekonomi digital dan industri di Era 4.0. Penataan frekuensi guna mendorong ekonomi digital dan industri di Era 4.0. Tersedianya digital dividend untuk alokasi frekuensi broadband 5G yang akan digunakan. Menghindari sengketa-sengketa dengan negara-negara tetangga yang disebabkn intervensi spektrum frekuensi di wilayah-wilayah perbatasan. **(Dev)-f**

SYAWALAN PERADI RBA - KAI

Sepakat Multibar Satu Kode Etik

YOGYA (KR) - Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) sepakat dengan sistem multi bar associaties. Keberadaan banyak Organisasi Advokat (OA) dinilai positif dalam perspektif demokrasi.

Hal ini tercetus dalam Syawalan dan Silaturahmi Multibar yang digelar kedua OA tersebut, Senin (23/5) malam di The Rich Jogja Hotel.

"Multibar dengan satu kode etik satu dewan kehormatan," ungkap Ketua DPD KAI DIY Feryan Harto Nugroho SH didampingi Ketua DPC Peradi RBA Bantul Fajar Mulia SH dalam sambutan bersama.

Selanjutnya dalam acara yang diikuti ratusan advokat dan tamu undangan dari Kejati DIY, Polda DIY dan Korem 072 Pamungkas, mewakili Advokat Senior, Triyandi Mulkan menyebutkan Advokat di Yogya meskipun berbeda OA tetap guyub, menjaga solidaritas. "Jangan seperti Advokat di Jakarta yang saling berseteru, sering terjadi keributan," jelasnya.

Triyandi mengingatkan pimpinan OA untuk memperhatikan kepentingan anggotanya. "Serta mengingatkan para advokat untuk meningkatkan moralitas dan menjaga solidaritas," tegasnya. Sedang tokoh masyarakat Yogya GBPH Yudhaningrat dalam sambutannya mengapresiasi keguyuban dua OA.

"Penting untuk saling bersilaturahmi dan bersinergi," tegasnya.

Hadir secara virtual Sekretaris Umum DPP KAI Ibrahim Massidenreng mewakili Presiden DPP KAI Tjoetjoe Sandjaja Hernanto. Serta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Peradi RBA Imam Hidayat mewakili Ketua Umum DPN Peradi RBA Luhut MP Pangaribuan. Pengurus Pusat mendukung langkah para advokat di Yogyakarta yang disampaikan secara daring. Acara diakhiri tukar menukar cenderamata. **(Vin)-f**

PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN
Jln. KRT. Pringgodiningrat No.1, Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telepon/Faksimile : (0274) 868401
Surel : pnsleman@yahoo.co.id | Laman : http://pn-sleman.go.id

PENGUMUMAN EKSEKUSI LELANG KE-DUA

Perkara No : 08/Pdt.E/2011/PN.Smn. Jo. No.107/Pdt.G/2007/PN.Slmn, Jo. No.52/Pdt/2008/PY.Y. Jo. No.940.K/Pdt/2009

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 November 2011 Nomor : 08/Pdt.E/2011/PN.Smn. Jo. No.107/Pdt.G/2007/PN.Slmn, Jo. No.52/Pdt/2008/PY.Y. Jo. No.940.K/Pdt/2009, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta tertanggal 07 April 2022 No: S-437/KNL.0905/2022, Perihal : Penetapan Jadwal Lelang, dengan ini Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang beralamat di Jl. KRT. Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (Closed Bidding) atas obyek jaminan hutang perkara tersebut di atas antara :

PT. INTI CAKRAWALA CITRA
Diwakili oleh Thomas E. Tampubolon, S.H., MH, Dkk
Alamat di Gedung Selmis Kav.4-5 Jl. Asem Baris Raya No.52 Jakarta Selatan
Sebagai Pemohon Eksekusi ;

Melawan

WAHYU TRIADI ------ Jatirejo RT.01/21, Sendangadi, Mlati, Kab. Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi.

Terhadap sebidang tanah Pekarangan beserta bangunan rumah tinggal dua lantai milik termohon eksekusi yang berdiri di atas sebidang tanah yang telah diletakkan Sita Jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 22 Januari 2008 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman No.107/Pdt.G/2007/PN.Slmn, seluas 118 m2 (Seratus delapan belas meter persegi) dengan Surat Ukur tanggal 25 Juni 2004 No. 01952/2004, SHM No.6362 tercatat atas nama WAHYU TRIADI yang terletak di Desa Sendangadi RT. 01/21, Kec. Mlati, Kab. Sleman dengan batas-batas :
- Sebelah Barat : Jalan (Gang)
- Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Suparti / Ibu Juminem
- Sebelah Utara : Tanah kosong milik Bapak Chris Tri W
- Sebelah Selatan : Tanah kosong milik Bapak Jumeri

Harga Limit : Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
Uang Jaminan : Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

Yang akan dilaksanakan Eksekusi Lelangnya pada :
Hari : RABU
Tanggal : 8 JUNI 2022
Batas Akhir Penawaran : 11.00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : https://www.lelang.go.id
Tempat : Pengadilan Negeri Sleman Klas IA Jl. KRT Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang :
1. Calon peserta lelang dapat melihat obyek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan Penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup **(Closed bidding)** yang diakses pada alamat domain *https://www.lelang.go.id*. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
3. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi lelang Internet alamat domain angka 2 diatas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file"jpg"png) , dan nomor Rekening atas nama sendiri, peserta yang bertindak sebagai kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notariil, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
4. **Jaminan Penawaran Lelang :**
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
   b. Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
   c. Jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang,Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim berkali-kali.
6. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli/pemegang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan uang jaminan penawaran lelang disetor ke Kas Negara.
7. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodiningrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jln. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 25 Mei 2022
PANITERA
PENGADILAN NEGERI SLEMAN

ATING BUDIMAN, S.H., M.H
NIP. 196506121986 03 1 002

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

'LOMPATAN' USAI DUA TAHUN LEBIH PANDEMI

Pj Walikota Didorong Munculkan Inovasi

YOGYA (KR) - Dilantiknya Sumadi SH MH sebagai Penjabat (Pj) Walikota Yogya diharapkan mampu memberikan warna dalam pemerintahan. Kalangan legislatif pun mendorong munculnya inovasi selama kepemimpinan Sumadi setelah dua tahun lebih Kota Yogya dilanda pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Kota Yogyakarta H Danang Rudiyatmoko, menuturkan pandemi telah membuat roda pembangunan sempat berjalan lambat akibat berbagai pembatasan. "Kami mendukung dan mendorong kepada Pj Walikota untuk bisa membuat inovasi. Mencari lompatan-lompatan setelah 2,5 tahun dilanda pandemi," tuturnya.

Inovasi tersebut dapat dipetakan dengan mengkaji program yang sudah berjalan selama ini dengan kondisi faktual yang terjadi. Danang pun optimis Sumadi tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja di Pemkot Yogya karena cukup berpengalaman dalam mengabdi di birokrasi. Apalagi dilantiknya Sumadi juga atas berbagai pertimbangan yang menyangkut kapasitasnya.

Terkait program kerja prioritas, menurut Danang, sudah ada rencana pembangunan daerah hingga 2025. Selain itu dipertajam melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah transisi sebagai landasan.

H Danang Rudiyatmoko
Ketua DPRD Kota Yogyakarta

KR-Ardhi Wahdan

"Rencana pembangunan itu disusun bersama antara eksekutif dan legislatif. Sehingga bisa menjadi pegangan bersama. Tapi semoga ada inovasi," tandasnya.

Inovasi yang dibutuhkan pada saat ini ialah percepatan peningkatan kesejahteraan. Saat pandemi melanda Indonesia maupun Kota Yogya, sejumlah target pembangunan otomatis harus dilakukan rasionalisasi. Sedangkan saat ini angka kasus Covid-19 sudah cukup terkendali, bahkan bisa dimaknai sudah memasuki fase endemi. Berbagai kelonggaran pun sudah diberikan serta kekhawatiran lonjakan kasus usai lebaran akhirnya tidak terjadi.

Oleh karena itu, Danang berharap komunikasi dapat dibangun dengan baik antara legislatif dengan eksekutif. Kendati kewenangan penjabat walikota tidak sekuat kepala daerah definitif namun hal tersebut bukan menjadi persoalan untuk memunculkan inovasi.

"Kami siap memberikan dukungan. Ketika ada hal-hal yang menjadi kendala tentu harus dikomunikasikan. Kita kan masih memiliki Gubernur kemudian Menteri Dalam Negeri sehingga bisa konsultasi. Makanya menuju 2024 ini, kita lakukan percepatan dengan inovasi pembangunan," jelasnya. **(Dhi)-f**